

Ta'dhim Transformatif Sebagai Model Pedagogi Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Perspektif Khudi Muhammad Iqbal

*Anas Mushthofa¹✉, STAI Nasy'atul Muta'allimin, Sumenep
Aribuddin², STAI Nasy'atul Muta'allimin, Sumenep*

Abstrak

Relasi kiai-santri merupakan karakteristik penting pendidikan pesantren yang dibangun melalui otoritas keilmuan, keteladanan, dan tradisi ta'dhim. Namun, relasi ini menghadirkan persoalan pedagogis ketika penghormatan dan kepatuhan berhadapan dengan tuntutan pembentukan kemandirian, daya kritis, dan tanggung jawab personal santri. Artikel ini bertujuan menganalisis ambivalensi tersebut melalui konsep Khudi Muhammad Iqbal dan merumuskan orientasi pedagogis ta'dhim dalam pendidikan pesantren. Penelitian menggunakan kajian pustaka kritis-integratif terhadap 28 sumber, terdiri atas 24 artikel jurnal terbit 2019–2026 dan empat karya fondasional mengenai pesantren, ta'dhim, dan pemikiran Iqbal. Data dianalisis melalui pemetaan tematik, perbandingan argumentasi, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ta'dhim dapat memperkuat Khudi ketika otoritas pedagogis kiai mengarahkan santri pada disiplin diri, internalisasi nilai, dialog, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan aktualisasi potensi. Sebaliknya, ta'dhim melemahkan Khudi ketika kepatuhan berkembang menjadi dominasi yang menutup penalaran, pilihan, dan tanggung jawab personal. Artikel ini menawarkan konsep ta'dhim transformatif sebagai model relasi pedagogis yang mempertahankan penghormatan terhadap otoritas keilmuan kiai sekaligus mengarahkannya pada pembentukan santri sebagai subjek moral dan intelektual yang berdaya.

Keyword: *Khudi, Otoritas Pedagogis, Pendidikan Pesantren,; Ta'dhim Transformatif*

Copyright ©2026 Anas Mushthofa

✉Corresponding author:

E-mail Address: anasmushthofa@gmail.com

Received 19-05-2026. Accepted 30-05-2026, Published 30-06-2026

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki karakteristik pedagogis berbeda dari pendidikan formal pada umumnya. Proses pendidikan tidak hanya berlangsung melalui transmisi pengetahuan, tetapi juga melalui keteladanan, pembiasaan, disiplin, dan relasi personal antara kiai dan santri. Kiai bukan hanya pengajar, tetapi juga pengasuh, rujukan keilmuan, teladan moral, dan dalam banyak kasus pemimpin komunitas. Karena itu, relasi kiai-santri mengandung dimensi pedagogis, spiritual, sosial, dan simbolik sekaligus. Dhofier menempatkan kiai sebagai elemen sentral dalam struktur pesantren, sementara tradisi adab yang dirumuskan dalam literatur klasik seperti *Ta'lim al-Muta'allim* menegaskan penghormatan kepada guru sebagai bagian dari etika memperoleh ilmu.¹ Dalam praktik pendidikan pesantren, penghormatan itu dikenal dengan istilah *ta'dhim*: sikap memuliakan guru yang diekspresikan melalui kesantunan, kepatuhan, pelayanan, penerimaan nasihat, dan kepercayaan pada otoritas keilmuan kiai.

Pada saat yang sama, pola tersebut melahirkan persepsi negatif yang cukup bertahan dalam diskursus tentang pesantren. Relasi kiai-santri sering dibaca sebagai relasi patron-klien yang asimetris, bahkan sebagai struktur yang memungkinkan dominasi simbolik. Studi Nauval menunjukkan bahwa akumulasi otoritas keilmuan, tradisional, dan simbolik dapat memberi kiai posisi dominan dalam pembentukan wacana serta praktik keagamaan santri.² Achmadin dan kolega juga mencatat bahwa relasi tersebut secara nyata mengandung hierarki, tetapi sekaligus menemukan negosiasi dan resistensi santri terhadap otoritas kiai.³ Persoalan akademiknya, karena itu, bukan sekadar

¹Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011); Burhanuddin al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim Thariq at-Ta'allum* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2004).

²Mukhammad Hubbab Nauval, "The Authority and Domination of Kyai in Forming Religious Discourse and Practice in Islamic Boarding Schools," *INDEV* 3, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.31958/indev.v3i1.12471>.

³Balya Ziaulhaq Achmadin et al., "Dismantling the Relationship between Kiai and Santri: A Critical Review of the Social and Cultural Dynamics of Pesantren in East Java," *Journal of Research and Thought on Islamic Education* 7, no. 2 (2024): 153–185, <https://doi.org/10.24260/jrtie.v7i2.3186>.

apakah pesantren memiliki hierarki, tetapi bagaimana hierarki tersebut bekerja dan apa akibatnya bagi pembentukan diri santri.

Kritik terhadap hubungan tersebut menjadi semakin penting ketika pendidikan kontemporer menempatkan otonomi, nalar kritis, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan sebagai bagian dari tujuan pendidikan. Yasin dan Khasbulloh menunjukkan bahwa pola patron-klien dapat menghasilkan hubungan saling menghormati, tetapi pada sisi lain dapat berkaitan dengan sikap fatalistik dan pandangan keilmuan yang tidak kritis.⁴ Hasanah, Fitriana, dan Fitriah bahkan menemukan konflik psikologis ketika pilihan akademik santri berhadapan dengan tekanan lembaga dan keluarga; dalam kasus yang mereka kaji, dominasi keputusan eksternal menghambat aktualisasi pilihan personal.⁵ Temuan-temuan seperti ini memperlihatkan alasan mengapa ta'dhim sering diasosiasikan dengan berkurangnya otonomi.

Generalisasi bahwa penghormatan kepada kiai selalu menghasilkan kepasifan juga sulit dipertahankan. Literatur memperlihatkan corak relasi yang jauh lebih beragam. Maryam, misalnya, membaca ta'dhim melalui pedagogi relasional dan menempatkannya sebagai fondasi kepercayaan, keteladanan, dan tanggung jawab moral, bukan semata hubungan represif.⁶ Rofidah dan Syam memperlihatkan bahwa tindakan simbolik santri dalam melayani guru dipahami dalam horizon penghormatan dan pencarian keberkahan.⁷ Sementara itu, Suroso, Rustandi, dan Mujib menemukan respons santri terhadap otoritas kiai bergerak dari penerimaan total sampai negosiasi kritis, dan bahwa keteladanan, komunikasi dialogis, kedekatan emosional, serta pelibatan santri menjadi bagian

⁴Muhamad Yasin and Muhammad Nabil Khasbulloh, "Constructing Ethical Critical Thinking at Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 127–144, <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19028>.

⁵Alya Hasanah, Ani Qotuz Zuhro' Fitriana, and Aidatul Fitriah, "Dilema Otonomi Akademik Santri di Tengah Otoritas Pesantren dan Orang Tua," *Jurnal Wahana Konseling* 8, no. 1 (2025): 54–62, <https://doi.org/10.31851/juang.v8i1.18625>.

⁶Siti Maryam, "Implementasi Ta'dzim Santri Kepada Kyai dalam Lingkungan Pesantren Perspektif Pedagogi Relasional," *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* 4, no. 1 (2023): 35–48, <https://jnus.lakpesdamsalatiga.or.id/index.php/jnus/article/download/133/66>.

⁷Lailatur Rofidah and Nur Syam, "Fenomenologi Relasi Santri-Kiai di Pesantren: Motif Nata Sandal di Kalangan Santri," *Jurnal TARBAWI* 10, no. 1 (2021): 33–48.

dari cara otoritas bekerja.⁸ Karena itu, label “patuh” saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa santri berada dalam posisi pasif.

Keragaman yang sama tampak pada kapasitas intelektual dan sosial santri. Praktik syawir dan bahtsul masail membuka ruang argumentasi dan berpikir kritis di dalam tradisi pesantren.⁹ Bahkan studi mutakhir tentang perilaku politik santri menunjukkan bahwa pengaruh kiai tidak selalu menentukan pilihan santri; diskusi dengan guru dan evaluasi rasional terhadap situasi politik dapat lebih berpengaruh.¹⁰ Literatur tersebut memperlihatkan relasi kiai-santri sebagai spektrum yang mencakup kepatuhan, afeksi, internalisasi nilai, negosiasi, dan agensi, bukan sebagai struktur tunggal yang selalu menghasilkan ketergantungan.

Konsep Khudi Muhammad Iqbal menawarkan lensa yang relevan untuk membaca persoalan tersebut. Khudi tidak menunjuk pada egoisme atau kebebasan individual tanpa batas, tetapi pada penguatan personalitas manusia sebagai subjek yang sadar, bertanggung jawab, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan potensinya dalam orientasi moral-spiritual. Dalam *Asrar-i Khudi*, Iqbal menolak pelemahan diri yang membuat manusia kehilangan daya bertindak, sedangkan dalam *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* ia menempatkan manusia sebagai ego yang dinamis, memiliki kebebasan, dan bertanggung jawab atas tindakannya.¹¹ Kajian pendidikan atas pemikiran Iqbal kemudian mengembangkan Khudi dalam kaitannya dengan kreativitas,

⁸Andri Suroso, Ridwan Rustandi, and Abdul Mujib, “Relasi Otoritas dan Keteladanan dalam Komunikasi Kiai-Santri,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2026): 179–202, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Tadbir/article/view/21078/0>.

⁹Yasin and Khasbulloh, “Constructing Ethical Critical Thinking”; Muthmainnah and Imam Athoir Rokhman, “Metode Syawir sebagai Strategi Pembelajaran Fiqih untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Santri Pesantren Mahasiswa Al-Hikam,” *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 268–277, <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/piwulang/article/view/3460>.

¹⁰Ayu Amanda A’isyatul Khumairo’, “Do Santri Still Obey the Kiai? Examining Voting Behaviour in Traditional and Modern Pesantren during the 2024 Presidential Election,” *PCD Journal* 13, no. 2 (2025): 41–90, <https://doi.org/10.22146/pcd.v13i2.23363>.

¹¹Muhammad Iqbal, *Asrar-i Khudi (Secrets of the Self)* (Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 2012); Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2013).

kemandirian, pendidikan karakter, kebebasan memilih, tanggung jawab, dan aktualisasi potensi manusia.¹²

Literatur mengenai relasi kiai-santri, sementara itu, telah berkembang dari pembacaan yang menekankan hierarki dan dominasi menuju pembacaan yang lebih beragam. Sejumlah penelitian menunjukkan kemungkinan terjadinya dominasi simbolik dan keterbatasan ruang santri dalam struktur otoritas pesantren, tetapi penelitian lain menemukan adanya negosiasi, resistensi, komunikasi dialogis, nalar kritis, dan agensi santri. Kajian mutakhir bahkan secara khusus memperdebatkan apakah ta'dhim merupakan ekspresi feodalisme atau bentuk penghormatan terhadap otoritas keilmuan. Malik, Ramadhan, dan Syibromalisi menunjukkan bahwa dalam diskursus digital ta'dhim dipertahankan sebagai penghormatan dan pembentukan identitas, sedangkan Hasanah dan Basid membedakan otoritas pedagogis-keagamaan yang memperoleh legitimasi dari ilmu dan tanggung jawab moral dari dominasi feodal yang menutup ruang kritik.¹³ Dengan demikian, problem akademik kontemporer tidak lagi cukup dirumuskan dalam pertanyaan dikotomis apakah relasi kiai-santri bersifat hierarkis atau egaliter, melainkan bagaimana otoritas tersebut bekerja dan konsekuensi pedagogis apa yang dihasilkannya terhadap pembentukan diri santri.

Pada sisi lain, studi mengenai Khudi dalam pendidikan Islam sebagian besar menempatkannya sebagai landasan filosofis bagi kreativitas, pendidikan karakter, kemandirian, kebebasan, kurikulum, dan pembentukan manusia yang utuh. Kajian Jannataini, Jamali, dan Sumanta, misalnya, merumuskan dimensi

¹²Muhammad Masruri, Muqowim, and Radjasa, "Konsep Khudi Iqbal dalam Pengembangan Kreatifitas Pembelajaran di Madrasah," *Jurnal Penelitian Keislaman* 16, no. 1 (2020): 46–59, <https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.2220>; M. Iqbal Lubis, Munzir Hitami, and Alpizar, "Pemikiran Muhammad Iqbal: Pengaruh Rekonstruksi Pendidikan Islam pada Dunia Pendidikan Tinjauan Filosofis Antropologis," *at-Tarbiyah al-Mustamirrah* 3, no. 2 (2022): 99–108, <https://doi.org/10.31958/atjpi.v3i2.6031>.

¹³Muhammad Umar Ibnu Malik, Tubagus Naufal Ramadhan, and Alwi Akhmad Syibromalisi, "Pesantren Feudalism or Ta'dzim? Contesting Western and Islamic Epistemologies in Digital Discourse," *el-Tarbawi* 19, no. 1 (2026), <https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/45574>; Ulfatul Hasanah and Abd. Basid Basid, "Relasi Kiai-Santri dan Tuduhan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren: Kajian Tafsir Tematik Atas Otoritas, Adab, dan Kritik," *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2026): 13–29, <https://doi.org/10.69698/jis.v5i1.1606>.

ontologis, epistemologis, dan aksiologis pendidikan dalam *Asrar-i Khudi*, sedangkan Khanafi, Arifin, dan Mukhlis menggunakan filsafat pendidikan Iqbal untuk mengevaluasi kebebasan dan tanggung jawab dalam Kurikulum MBKM.¹⁴ Literatur tersebut memperlihatkan kekuatan Khudi sebagai filsafat pembentukan manusia, tetapi belum mengoperasionalkannya secara khusus sebagai perangkat untuk mengevaluasi proses pedagogis dalam relasi kiai-santri.

Di titik inilah terdapat *research gap* artikel ini. Studi tentang pesantren telah menghasilkan penjelasan yang kaya mengenai otoritas, ta'dhim, dominasi, dialog, dan agensi, tetapi belum menyediakan kerangka yang menjelaskan proses perubahan dari kepatuhan yang digerakkan oleh otoritas eksternal menuju regulasi diri dan agensi moral santri. Sebaliknya, studi tentang Khudi telah menegaskan pentingnya disiplin, kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab, tetapi belum menghubungkan dimensi-dimensi tersebut dengan dinamika konkret ta'dhim dalam relasi kiai-santri. Karena itu, celah penelitian bukan terletak pada belum adanya pembahasan mengenai ta'dhim, otoritas, atau Khudi secara terpisah, melainkan pada belum tersedianya model pedagogis yang mengintegrasikan ketiganya untuk menjelaskan arah transformasi diri santri di dalam struktur otoritas pesantren.

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan konsep ta'dhim transformatif. Kebaruannya terletak pada dua hal. Pertama, Khudi dioperasionalkan sebagai kriteria evaluatif untuk membedakan ta'dhim dominatif, pedagogis, dan transformatif berdasarkan akibatnya terhadap kesadaran diri, disiplin, penalaran, kemampuan memilih, kreativitas, dan tanggung jawab santri. Kedua, ta'dhim transformatif tidak diposisikan sekadar sebagai jalan tengah antara kepatuhan dan kebebasan, tetapi sebagai proses

¹⁴Zahira Jannataini, Jamali, and Sumanta, "Philosophical Foundation of Islamic Education in Muhammad Iqbal's *Asrar-i Khudi*: An Ontological, Epistemological, and Axiological Analysis," *Jurnal Fuaduna* 9, no. 1 (2025): 83–99, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v9i1.9434>; Ade Firman Khanafi, Syamsul Arifin, and Fahrudin Mukhlis, "Muhammad Iqbal's Islamic Education Philosophy: Critical Analysis MBKM Curriculum," *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 11, no. 1 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v11i1.390>.

pedagogis bertahap yang bergerak dari otoritas eksternal, internalisasi nilai, dialog dan pemberian amanah, menuju kemampuan mengambil keputusan serta regulasi diri. Dengan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis ambivalensi ta'dhim melalui konsep Khudi Muhammad Iqbal sekaligus merumuskan model transformasi otoritas kiai dari pengendalian perilaku menuju pembentukan santri sebagai subjek moral dan intelektual yang berdaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka kritis-integratif. Pendekatan integratif dipilih karena masalah yang dikaji tidak hanya menuntut rangkuman penelitian terdahulu, tetapi juga perbandingan perspektif yang berlawanan dan penyusunan sintesis konseptual baru. Snyder menjelaskan bahwa kajian pustaka dapat berfungsi sebagai metodologi penelitian ketika proses pemilihan, pengorganisasian, dan sintesis literatur dilakukan secara transparan untuk menghasilkan pemahaman teoritis yang lebih utuh.¹⁵

Sumber data disusun dalam dua kelompok. Pertama, literatur tentang pesantren yang membahas ta'dhim, otoritas kiai, patronase, komunikasi kiai-santri, otonomi, berpikir kritis, transformasi relasi, dan agensi santri. Kedua, literatur tentang Khudi Muhammad Iqbal yang membahas selfhood, kreativitas, tanggung jawab, karakter, dan tujuan pendidikan. Korpus akhir terdiri atas 28 sumber: 24 artikel jurnal terbit 2019–2026 dan empat karya fondasional, yaitu dua karya Muhammad Iqbal, Ta'lim al-Muta'allim karya al-Zarnuji, dan Tradisi Pesantren karya Dhofier. Dengan demikian, sekitar 86 persen korpus merupakan artikel jurnal dalam rentang sepuluh tahun terakhir, sedangkan karya klasik dipertahankan karena berfungsi sebagai sumber konseptual primer.

Penelusuran literatur dilakukan melalui laman jurnal, Garuda, repositori institusi, dan portal akademik dengan kombinasi kata kunci “relasi kiai-santri”, “ta'dhim santri”, “otoritas kiai”, “pesantren critical thinking”, “student agency pesantren”, “Khudi Muhammad Iqbal”, dan “Muhammad Iqbal education”.

¹⁵Hannah Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

Penelusuran diperbarui sampai Agustus 2026. Setiap artikel diverifikasi melalui laman penerbit atau DOI, kemudian dipilih apabila memiliki keterkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian, memberikan data atau argumentasi mengenai bentuk relasi kiai-santri, atau menjelaskan dimensi Khudi yang dapat digunakan sebagai kategori analitis. Duplikasi dan literatur yang hanya mendeskripsikan pesantren tanpa membahas relasi, otoritas, atau pembentukan diri tidak dimasukkan. Pemilihan tidak dibatasi pada satu tipe pesantren agar variasi relasi dapat tertangkap dalam sintesis.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pemetaan tematik terhadap bentuk-bentuk relasi dan konsekuensinya bagi santri. Kedua, perbandingan kritis antara temuan yang menekankan dominasi dengan temuan yang menunjukkan dialog, negosiasi, kepemimpinan, dan nalar kritis. Ketiga, sintesis dengan konsep Khudi untuk merumuskan batas normatif antara ta'dhim yang membentuk disiplin diri dan ta'dhim yang berubah menjadi penundukan. Dengan prosedur tersebut, hasil kajian tidak dimaksudkan menggeneralisasi seluruh pesantren, melainkan menawarkan model konseptual yang dapat diuji lebih lanjut dalam berbagai konteks pesantren.

Untuk menjaga ketertelusuran dan konsistensi sintesis, setiap sumber dibaca berdasarkan empat kategori: sumber legitimasi otoritas kiai, bentuk respons santri, ruang pengambilan keputusan, dan konsekuensi pembentukan diri. Temuan yang saling bertentangan tidak dieliminasi, tetapi ditempatkan sebagai variasi konteks. Langkah ini penting karena kajian tentang pesantren memperlihatkan hasil yang tidak seragam: pada satu konteks otoritas dapat membatasi pilihan, sedangkan pada konteks lain relasi yang hierarkis justru menyediakan keteladanan, keamanan psikologis, dan kesempatan belajar. Sintesis kemudian diuji secara konseptual dengan dimensi Khudi – kesadaran diri, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, dan kemampuan bertindak – sehingga kategori akhir dibangun dari pertemuan bukti empiris dan kerangka filosofis, bukan dari asumsi normatif tentang pesantren. Prosedur kategorisasi yang sama diterapkan pada seluruh sumber untuk menjaga konsistensi interpretasi dan

memungkinkan setiap kesimpulan ditelusuri kembali pada literatur yang dianalisis.¹⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ta'dhim dan Otoritas dalam Relasi Kiai-Santri

Ta'dhim lahir dari struktur pendidikan yang memandang ilmu tidak sekadar sebagai informasi, tetapi sebagai amanah yang ditransmisikan melalui hubungan etis. Al-Zarnuji menempatkan penghormatan kepada guru sebagai bagian dari syarat kebermanfaatan ilmu.¹⁷ Dalam kultur pesantren, kerangka ini diperkuat oleh posisi kiai sebagai pemilik otoritas keilmuan dan keteladanan. Karena otoritas tersebut tidak hanya bersumber dari jabatan formal, ketaatan santri sering berhubungan dengan kepercayaan pada integritas moral, kedalaman ilmu, sanad, dan pengalaman spiritual kiai. Nurmahmudah menunjukkan bahwa otoritas kiai berpengaruh terhadap pola pendidikan dan cara berpikir santri, tetapi pengaruh tersebut juga dapat diarahkan pada inovasi, misalnya ketika kiai mendorong pemanfaatan teknologi untuk dakwah.¹⁸ Dengan kata lain, akibat dari otoritas sangat bergantung pada orientasi pedagogis yang menyertainya; dalam konteks tertentu ia dapat konservatif, dalam konteks lain justru produktif.

Maryam menawarkan pembacaan yang keluar dari dikotomi “ta'dhim versus kebebasan”. Dalam perspektif pedagogi relasional, penghormatan membangun kepercayaan yang memungkinkan proses belajar berjalan karena santri memandang guru sebagai figur yang layak diikuti.¹⁹ Relasi semacam ini tetap asimetris karena guru memiliki otoritas lebih besar, tetapi asimetri tidak selalu berujung pada dominasi. Dalam pendidikan, perbedaan posisi dapat berfungsi pedagogis selama otoritas dipakai untuk membimbing, memberi

¹⁶Hannah Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>; Achmadin et al., “Dismantling the Relationship between Kiai and Santri.”

¹⁷Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*.

¹⁸Nurmahmudah, “Quo Vadis Pendidikan Pondok Pesantren dan Pengaruhnya Otoritas Kiai dalam Perspektif Filsafat Sosiologi,” *Wahana Akademika* 10, no. 2 (2023): 89–110, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/14936>.

¹⁹Maryam, “Implementasi Ta'dzim Santri Kepada Kyai,” 35–48.

teladan, membuka pengalaman belajar, dan mengarahkan perkembangan peserta didik.

Studi tentang interaksi nyai dan santri perempuan juga memperlihatkan bahwa otoritas di pesantren beroperasi melalui kehidupan sehari-hari, bukan hanya ruang kelas.²⁰ Kedekatan, teladan, disiplin, dan pola komunikasi membentuk proses internalisasi yang sulit dipisahkan satu sama lain. Karena itu, memahami ta'dhim hanya dari tindakan lahiriah—mencium tangan, berdiri, melayani, mengikuti arahan—berisiko mengabaikan makna subjektif dan fungsi pendidikan yang dilekatkan santri pada tindakan tersebut. Simbol kepatuhan perlu dibaca bersama proses pembentukan kemampuan yang terjadi sesudahnya.

Namun, dimensi etis tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup kritik. Nauval memperlihatkan bahwa konsentrasi modal keilmuan, ekonomi, budaya, dan simbolik pada kiai dapat menghasilkan dominasi wacana, sedangkan santri memiliki ruang terbatas untuk menentukan praktiknya.²¹ Kritik ini penting karena ta'dhim dapat kehilangan fungsi pedagogis ketika penghormatan berubah menjadi kepatuhan tanpa ruang pertimbangan. Persoalannya terletak pada relasi yang berhenti pada ketaatan dan tidak memberi jalan menuju kedewasaan personal.

Dari Hierarki ke Negosiasi: Variasi Relasi Pesantren

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa relasi kiai-santri tidak statis. Achmadin dan kolega menemukan hierarki sekaligus negosiasi dan resistensi dalam kehidupan pesantren.²² Rohani juga menunjukkan transformasi menuju hubungan yang lebih partisipatif, egaliter, dan dialogis ketika pesantren merespons perubahan teknologi dan sosial.²³ Pada era digital, Solichin dan

²⁰Mohammad Takdir et al., "Understanding Social-Interaction between Nyai and Female Santri in Pesantren Annuqayah, East Java," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 1 (2022): 125–152, <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2548>.

²¹Nauval, "The Authority and Domination of Kyai," 1–15.

²²Achmadin et al., "Dismantling the Relationship between Kiai and Santri," 153–185.

²³Rohani, "Transformasi Relasi Kyai dan Santri dalam Tradisi Pesantren: Kajian Sosiologi Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 24, no. 2 (2024): 24–42, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/8208>.

kollega menemukan bahwa akses santri terhadap sumber pengetahuan alternatif mengubah karakter kepercayaan kepada kiai: otoritas tidak hilang, tetapi harus berhadapan dengan proses verifikasi, jaringan pengetahuan baru, dan bentuk modal sosial yang lebih terbuka.²⁴ Gambaran pesantren sebagai ruang tertutup dengan pola ketaatan yang seragam, karena itu, tidak sesuai dengan variasi yang ditunjukkan oleh literatur tersebut.

Perubahan tersebut tidak selalu berarti sekularisasi otoritas. Suroso, Rustandi, dan Mujib justru memperlihatkan bahwa legitimasi kiai dapat bertahan ketika otoritas keilmuan dipadukan dengan keteladanan, komunikasi dialogis, dan pelibatan santri.²⁵ Dalam pola ini, otoritas bekerja terutama melalui kredibilitas moral dan kualitas hubungan, bukan sekadar perintah. Santri menerima arahan karena mempercayai kiai, tetapi tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi kritis. Relasi semacam ini dapat disebut otoritas pedagogis, yakni otoritas yang memperoleh legitimasi dari kemampuannya membantu peserta didik tumbuh.

Kemampuan santri untuk berpikir kritis merupakan bukti penting bahwa adab dan nalar tidak harus saling meniadakan. Yasin dan Khasbulloh menggambarkan model “ethical critical thinking” yang tetap memelihara penghormatan kepada kiai sembari mendorong budaya kritis, kreatif, dan demokratis.²⁶ Muthmainnah dan Rokhman menunjukkan bagaimana syawir mengembangkan kemampuan argumentasi melalui diskusi fiqh.²⁷ Secara teoritis, praktik ini memperlihatkan bahwa penghormatan kepada tradisi dan guru dapat menjadi kerangka etis bagi perdebatan tanpa harus mematikan perdebatan itu sendiri.

²⁴Mohammad Muchlis Solichin et al., “Reconstruction of Islamic Education Based on Social Capital: A Sociological Analysis of the Transformation of the Relationship between Kyai and Santri in the Digital Era,” *IHSAN: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 101–110, <https://doi.org/10.66031/ihsan.v2i1.437>.

²⁵Suroso, Rustandi, and Mujib, “Relasi Otoritas dan Keteladanan,” 179–202.

²⁶Yasin and Khasbulloh, “Constructing Ethical Critical Thinking,” 127–144.

²⁷Muthmainnah and Rokhman, “Metode Syawir,” 268–277.

Bahkan dalam wilayah yang selama ini dianggap paling kuat dipengaruhi kiai, yaitu pilihan politik, pola kepatuhan menunjukkan perubahan. Khumairo' menemukan bahwa kiai tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan politik santri pada dua pesantren yang diteliti; diskusi kelas dengan ustaz/ustazah dan evaluasi santri terhadap pemerintahan justru lebih menentukan.²⁸ Temuan ini tidak dapat digeneralisasi ke semua pesantren, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa asumsi "santri selalu mengikuti kiai" tidak lagi dapat diperlakukan sebagai hukum sosial. Santri memiliki agensi yang tingkatnya dipengaruhi konteks pendidikan, pengalaman organisasi, akses informasi, dan pola komunikasi.

Dampak negatif lebih mudah terlihat ketika keputusan pendidikan menutup ruang partisipasi santri. Hasanah, Fitriana, dan Fitriah menunjukkan bahwa tekanan institusi dan keluarga dalam menentukan perguruan tinggi dapat memunculkan frustrasi, penurunan motivasi, dan hambatan aktualisasi diri.²⁹ Irbathy dan Fahma juga berangkat dari risiko pedagogi yang terlalu menekankan ketaatan absolut dan menawarkan pembelajaran dialogis-reflektif untuk memperkuat agensi santri.³⁰ Temuan tersebut memberi batas yang cukup jelas: penghormatan yang tidak menyediakan ruang bagi pertimbangan personal dapat bergeser dari adab menuju heteronomi.

Khudi sebagai Kriteria Evaluatif

Khudi memberikan perangkat konseptual untuk menilai ambivalensi tersebut. Dalam filsafat Iqbal, diri manusia bukan substansi pasif yang harus dilebur, tetapi ego dinamis yang bertumbuh melalui tindakan, disiplin, pilihan, pengalaman, dan orientasi kepada Tuhan. Asrar-i Khudi menempatkan penguatan diri sebagai jalan menuju aktualisasi kemampuan manusia, sedangkan *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* menegaskan

²⁸Khumairo', "Do Santri Still Obey the Kiai?," 41–90.

²⁹Hasanah, Fitriana, and Fitriah, "Dilema Otonomi Akademik Santri," 54–62.

³⁰Shafa Alistiana Irbathy and Naomi Fahma, "Reconstructing Pesantren Pedagogy: Integrating Social-Emotional Learning (SEL) and Sayyidah 'Ā'ishah's Intellectual Rigor to Enhance Student Agency," *Assyfa Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.61650/ajis.v3i1.688>.

kebebasan dan tanggung jawab ego dalam dunia yang terus menjadi.³¹ Dalam perspektif Iqbal, pengalaman keagamaan justru semestinya memperkuat kemampuan bertindak dan mengarahkan energi spiritual pada kreativitas serta tanggung jawab.

Kajian pendidikan atas Iqbal mendukung pembacaan tersebut. Masruri menghubungkan Khudi dengan kreativitas pembelajaran; Lubis, Hitami, dan Alpizar menekankan ruang gerak serta kreativitas bagi perkembangan manusia; Masluhah, Afifah, dan Salik mengaitkannya dengan pendidikan karakter dan kesadaran diri.³² Ramin merumuskan sejumlah unsur pendidikan Iqbal berupa individualitas, pertumbuhan individu, keseimbangan jasmani-rohani, keterhubungan individu dengan masyarakat, kreativitas, intelektualitas, spiritualitas, dan pendidikan watak.³³ Khudi karena itu tidak dapat direduksi menjadi “kebebasan dari otoritas”. Ia tetap memerlukan disiplin dan orientasi moral, dengan syarat keduanya dihayati secara sadar oleh subjek.

Jannataini, Jamali, dan Sumanta menegaskan bahwa fondasi pendidikan dalam Asrar-i Khudi mencakup realisasi diri, penalaran kritis, ijtihad dinamis, integrasi pengetahuan, tanggung jawab etis, dan otonomi moral.³⁴ Hidayat dan Alamsah juga menempatkan Khudi sebagai kesadaran yang mengintegrasikan dimensi fisik dan metafisik serta menghindarkan manusia dari fragmentasi modern.³⁵ Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa Khudi mempertemukan kebebasan dengan keterikatan moral. Ketaatan seorang santri tidak dengan sendirinya bertentangan dengan Khudi selama ketaatan itu

³¹Iqbal, *Asrar-i Khudi*; Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*.

³²Masruri, Muqowim, and Radjasa, “Konsep Khudi Iqbal,” 46–59; Lubis, Hitami, and Alpizar, “Pemikiran Muhammad Iqbal,” 99–108; Masluhah, Kiki Rizkiatul Afifah, and Mohamad Salik, “Pemikiran Muhammad Iqbal tentang Pendidikan Karakter dan Relevansinya dengan Era Disrupsi,” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 317–338, <https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.2.317-338>.

³³Maghfur M. Ramin, “Rekonstruksi Falsafah Pendidikan Muhammad Iqbal di Era Society 5.0,” *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2023): 192–210, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/download/399/219/1565>.

³⁴Jannataini, Jamali, and Sumanta, “Philosophical Foundation,” 83–99.

³⁵Alfan Hidayat and Johan Alamsah, “Muhammad Iqbal's Philosophy of Khudi (A Critical Analysis of Modern Science),” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 6, no. 1 (2024): 19–42, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i1.20742>.

memperbesar kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuannya mengambil peran.

Khudi memberi ukuran yang cukup konkret untuk menilai ta'dhim. Penghormatan kepada kiai dapat dibaca sebagai proses penguatan diri bila ia melatih pengendalian diri, kesediaan belajar, keberanian memikul tanggung jawab, dan pengembangan kapasitas. Masalah muncul ketika kepatuhan justru membuat santri tidak mampu menimbang alasan, takut mengambil keputusan, atau menyerahkan tanggung jawab personal kepada otoritas. Perdebatan tentang ta'dhim, dengan demikian, lebih tepat diarahkan pada akibat pedagogisnya daripada pada simbol penghormatan semata.

Ta'dhim Transformatif: Dari Kepatuhan Etis menuju Agensi Santri

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini menggunakan istilah ta'dhim transformatif untuk menyebut penghormatan kepada kiai yang tetap mengakui asimetri otoritas keilmuan, tetapi diarahkan pada pembentukan santri yang makin mampu mengelola diri. Hierarki tidak harus dihapus; yang perlu berubah adalah fungsinya. Otoritas yang semula mengarahkan perilaku perlu berkembang menjadi pembinaan yang membantu santri memahami nilai, memikul tanggung jawab, dan pada akhirnya mengambil keputusan secara lebih mandiri.

Transformasi tersebut bergantung setidaknya pada empat hal. Legitimasi otoritas perlu bertumpu pada keilmuan dan keteladanan, bukan pada privilese simbolik semata. Kepatuhan juga perlu disertai ruang dialog agar santri memahami alasan moral atau pedagogis dari suatu arahan. Relasi pendidikan selanjutnya harus memberi pengalaman nyata—amanah, organisasi, musyawarah, kepemimpinan, pengabdian, atau kerja intelektual—yang menempatkan santri sebagai pelaku. Ujung prosesnya ialah bertambahnya kemampuan santri mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya.

Arah ini sejalan dengan temuan tentang otoritas berbasis keteladanan, nalar kritis, transformasi relasi, dan agensi santri.³⁶

Pembedaan antara *ta'dhim dominatif*, *ta'dhim pedagogis*, dan *ta'dhim transformatif* terletak bukan pada ada atau tidaknya penghormatan kepada kiai, tetapi pada fungsi otoritas dan arah perkembangan diri santri yang dihasilkannya. Pada *ta'dhim dominatif*, otoritas terutama bekerja sebagai kontrol eksternal; kepatuhan menjadi tujuan akhir, ruang dialog dan pilihan terbatas, dan santri tetap bergantung pada figur otoritas dalam menentukan tindakan. Dalam kondisi ini, Khudi cenderung melemah karena kemampuan menimbang alasan, mengambil keputusan, dan memikul tanggung jawab personal tidak berkembang secara memadai.

Pada *ta'dhim pedagogis*, otoritas tidak berhenti pada kontrol, tetapi berfungsi membimbing. Kepatuhan disertai keteladanan, penjelasan, pembinaan, dan internalisasi nilai sehingga santri mulai memahami alasan moral dan pendidikan di balik suatu aturan. Khudi mulai bertumbuh melalui disiplin diri, penerimaan amanah, dan kesadaran terhadap nilai, meskipun pengambilan keputusan masih banyak diarahkan oleh otoritas kiai.

Adapun *ta'dhim transformatif* merupakan tahap ketika fungsi otoritas berkembang lebih jauh dari pembinaan menuju pemberdayaan. Santri tidak hanya memahami dan menginternalisasi nilai, tetapi juga memperoleh ruang untuk berdialog, bermusyawarah, memikul amanah, memimpin, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Dalam corak ini, otoritas eksternal secara bertahap ditransformasikan menjadi regulasi diri. Karena itu, *ta'dhim transformatif* bukan bentuk penghormatan baru yang menggantikan tradisi *ta'dhim*, melainkan kerangka transformasi pedagogis yang menjelaskan bagaimana penghormatan dan kepatuhan dapat berkembang menjadi agensi moral dan intelektual santri.

³⁶Suroso, Rustandi, and Mujib, "Relasi Otoritas dan Keteladanan"; Yasin and Khasbulloh, "Constructing Ethical Critical Thinking"; Solichin et al., "Reconstruction of Islamic Education Based on Social Capital"; Irbathy and Fahma, "Reconstructing Pesantren Pedagogy."

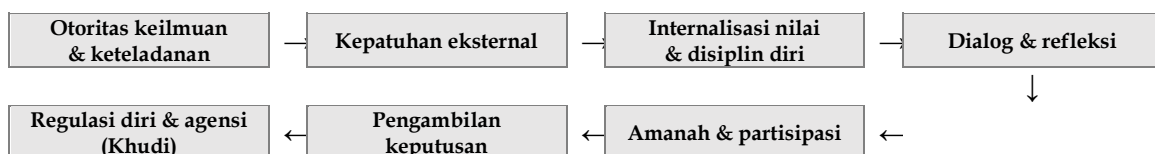
Dengan demikian, kebaruan model ini terletak pada penjelasan mengenai mekanisme perubahan fungsi otoritas, bukan semata-mata pada klasifikasi bentuk relasi. Transformasi bergerak dari kepatuhan yang terutama digerakkan oleh otoritas eksternal menuju internalisasi nilai dan disiplin diri, kemudian berkembang melalui dialog dan pemberian amanah, dilanjutkan dengan pengalaman mengambil keputusan, dan bermuara pada kemampuan santri mengatur serta mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri. Pada titik inilah *ta'dhim* bertemu dengan Khudi: penghormatan kepada otoritas tidak menghasilkan ketergantungan permanen, tetapi menjadi medium pembentukan personalitas yang sadar, bertanggung jawab, kreatif, dan mampu bertindak.

Tabel 1. Spektrum Ta'dhim dan Implikasinya terhadap Khudi Santri

Spektrum Relasi	Karakter Utama	Implikasi terhadap Khudi
Ta'dhim dominatif	Otoritas tertutup; kepatuhan sebagai tujuan; pilihan dan kritik dibatasi	Khudi melemah: ketergantungan, heteronomi, rendahnya tanggung jawab personal
Ta'dhim pedagogis	Otoritas berbasis ilmu dan teladan; kepatuhan disertai pembinaan dan pemaknaan	Khudi bertumbuh: disiplin diri, internalisasi nilai, kesiapan memikul amanah
Ta'dhim transformatif	Dialog, musyawarah, amanah, kepemimpinan, pengembangan potensi, ruang mengambil keputusan	Khudi menguat: agensi, kreativitas, otonomi moral, tanggung jawab sosial

Untuk memperjelas mekanisme tersebut, alur *ta'dhim transformatif* divisualisasikan sebagai proses perubahan fungsi otoritas berikut.

Gambar 1. Model Transformasi Ta'dhim Berbasis Khudi



Gambar 1 memperlihatkan bahwa *ta'dhim transformatif* tidak berlangsung melalui penghapusan otoritas kiai, melainkan melalui perubahan fungsi otoritas itu sendiri. Pada tahap awal, kiai berperan kuat dalam mengarahkan perilaku melalui keteladanan, aturan, dan bimbingan. Selanjutnya, nilai yang semula diterima melalui otoritas eksternal diinternalisasi melalui pemahaman, dialog, dan pengalaman. Pemberian amanah serta ruang pengambilan keputusan memungkinkan santri menguji nilai tersebut dalam tindakan. Ketika santri semakin mampu mengatur diri dan mempertanggungjawabkan pilihannya, otoritas telah menjalankan fungsi transformatifnya. Dengan demikian, keberhasilan *ta'dhim* tidak diukur dari lamanya ketergantungan santri kepada figur kiai, tetapi dari kemampuannya mengubah kepatuhan eksternal menjadi kesadaran moral dan agensi yang berlandaskan nilai.

Implikasi Pedagogis bagi Pesantren

Perbedaan antara otoritas pedagogis dan dominasi perlu diletakkan pada cara legitimasi diproduksi dan digunakan. Otoritas pedagogis meminta pengakuan karena kompetensi, keteladanan, dan kemampuan membimbing; dominasi menuntut kepatuhan karena ketidaksetaraan posisi itu sendiri. Dalam relasi pertama, santri masih dapat bertumbuh menjadi subjek yang mampu menilai dan bertanggung jawab. Dalam relasi kedua, ketergantungan dipelihara sebagai kondisi permanen. Kajian Suroso, Rustandi, dan Mujib memperlihatkan bahwa legitimasi kiai lebih kuat ketika ditopang keteladanan dan komunikasi partisipatif, sedangkan Achmadin dan kolega menemukan adanya negosiasi bahkan di dalam struktur hierarkis.³⁷ Yang perlu dievaluasi, dengan demikian, ialah proses legitimasi dan konsekuensi pendidikannya, bukan bentuk hierarkinya semata.

Digitalisasi membuat persoalan tersebut semakin nyata karena otoritas kiai kini beroperasi dalam lingkungan pengetahuan yang plural. Santri dapat membandingkan ceramah, fatwa, kitab digital, dan wacana sosial di luar

³⁷Suroso, Rustandi, and Mujib, "Relasi Otoritas dan Keteladanan," 179–202; Achmadin et al., "Dismantling the Relationship between Kiai and Santri," 153–185.

pesantren. Solichin dan kolega menunjukkan pergeseran kepercayaan dari pola yang semata askriptif menuju kepercayaan yang lebih disertai verifikasi.³⁸ Perubahan ini tidak serta-merta menunjukkan kemerosotan ta'dhim. Justru di sinilah kualitas otoritas diuji. Penghormatan yang bertumpu pada kedalaman ilmu dan keteladanan lebih mungkin bertahan ketika santri memiliki akses informasi luas daripada penghormatan yang bergantung pada pembatasan informasi. Tantangan pesantren ialah menjaga kiai tetap menjadi sumber orientasi di tengah semakin banyaknya pilihan yang dimiliki santri.

Khudi membantu menempatkan otonomi secara berbeda dari individualisme. Iqbal tidak membayangkan diri yang matang sebagai ego yang bebas dari relasi, melainkan ego yang menguat melalui disiplin, tindakan, hubungan sosial, dan orientasi kepada Tuhan.³⁹ Menerima bimbingan, karena itu, tidak dengan sendirinya mengurangi diri. Yang penting ialah apakah bimbingan tersebut berkembang menjadi kemampuan mengatur diri atau berhenti sebagai kontrol eksternal. Ta'dhim bernilai pedagogis ketika santri tidak hanya melakukan sesuatu karena diperintah, tetapi perlahan mampu memahami, memilih, dan mempertanggungjawabkan tindakan yang diyakininya benar. Dalam kerangka ini, adab dan agensi dapat dipahami sebagai bagian dari satu proses perkembangan.

Khudi juga menuntut dimensi produktif. Personalitas yang kuat tidak cukup ditandai dengan kemampuan menolak tekanan, tetapi dengan daya mencipta, mengambil inisiatif, dan berkontribusi. Masruri menghubungkan Khudi dengan kreativitas belajar, sedangkan Ramin dan Jannataini menekankan pertumbuhan individual, intelektualitas, tanggung jawab etis, dan aktualisasi diri.⁴⁰ Ukuran relasi kiai-santri yang sehat juga tidak cukup berhenti pada tertibnya perilaku santri. Perlu dilihat apakah santri berani bertanya secara beradab, mampu

³⁸Solichin et al., "Reconstruction of Islamic Education Based on Social Capital," 101–110.

³⁹Iqbal, *Asrar-i Khudi*; Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*.

⁴⁰Masruri, Muqowim, and Radjasa, "Konsep Khudi Iqbal," 46–59; Ramin, "Rekonstruksi Falsafah Pendidikan Muhammad Iqbal," 192–210; Jannataini, Jamali, and Sumanta, "Philosophical Foundation," 83–99.

memimpin, mengambil keputusan, mengembangkan kompetensi, serta membawa nilai yang dipelajari ke dalam tindakan sosial. Dengan ukuran seperti ini, Khudi dapat dipakai secara lebih operasional untuk menilai apakah ta'dhim benar-benar mendidik atau hanya mereproduksi kepatuhan.

Model ta'dhim transformatif memiliki implikasi langsung pada desain pembinaan. Pesantren perlu membedakan area yang memang memerlukan kepatuhan normatif—misalnya disiplin komunal dan etika belajar—dari area yang semestinya menjadi ruang latihan keputusan. Pada area kedua, santri perlu diberi kesempatan memilih kegiatan, menyusun program, menyampaikan argumen, dan mengevaluasi pengalaman. Praktik syawir menunjukkan bahwa tradisi pesantren sendiri telah memiliki perangkat dialogis untuk melatih nalar tanpa menghilangkan adab.⁴¹ Prinsip musyawarah dapat diperluas ke organisasi, pengembangan minat-bakat, dan pengambilan keputusan pendidikan. Dengan cara itu, ta'dhim menjadi titik berangkat menuju tanggung jawab: santri tetap belajar menghormati otoritas sambil mengalami sendiri bahwa penghormatan tidak menghapus kewajiban untuk berpikir dan mempertanggungjawabkan pilihan.

Keteladanan perlu ditempatkan sebagai sumber utama legitimasi otoritas. Kiai yang membuka ruang pertanyaan, menjelaskan alasan kebijakan, dan mempercayakan amanah secara bertahap memberi pesan bahwa penghormatan tidak meniadakan kecakapan berpikir. Temuan tentang komunikasi dialogis kiai-santri dan perubahan relasi di era digital mendukung arah ini.⁴² Mekanisme tersebut lebih tepat dipahami sebagai pembimbingan moral yang bertahap. Pada tahap awal santri mengikuti aturan dan teladan; kemudian mereka diajak memahami alasan, memperoleh tanggung jawab, dan pada akhirnya bertindak lebih mandiri dengan nilai yang telah terinternalisasi. Hierarki tetap ada, tetapi fungsinya bergerak dari pengendalian eksternal menuju pembentukan regulasi

⁴¹Muthmainnah and Rokhman, “Metode Syawir,” 268–277; Yasin and Khasbulloh, “Constructing Ethical Critical Thinking,” 127–144.

⁴²Suroso, Rustandi, and Mujib, “Relasi Otoritas dan Keteladanan,” 179–202; Solichin et al., “Reconstruction of Islamic Education Based on Social Capital,” 101–110.

diri. Dalam pola seperti ini, kewibawaan kiai terlihat dari kemampuannya menumbuhkan kedewasaan santri, bukan dari lamanya ketergantungan dipertahankan.

Pesantren juga memerlukan mekanisme korektif ketika otoritas melampaui fungsi pedagogis. Ruang musyawarah, pendampingan akademik, akses menyampaikan keberatan, serta keterlibatan santri dalam keputusan yang menyangkut masa depannya dapat menjadi pengaman agar *ta'dhim* tidak berubah menjadi pembenaran dominasi. Temuan tentang dilema pilihan akademik menunjukkan bahwa maksud mendidik sekalipun dapat menghasilkan frustrasi ketika suara santri ditiadakan.⁴³ Mekanisme korektif tidak perlu dibingkai sebagai pembangkangan terhadap kiai. Ia dapat dipahami sebagai bagian dari amanah pendidikan. Kiai tetap memiliki kewenangan membimbing, sedangkan keputusan yang menyangkut perkembangan personal santri perlu menyediakan ruang penjelasan, konsultasi, dan pertimbangan kemampuan individual. Dengan cara ini, kepatuhan tetap berjalan tanpa menutup komunikasi dua arah.

Rangkaian pada Gambar 1 merupakan model analitis, bukan urutan linier yang harus berlangsung secara identik pada setiap pesantren atau setiap santri. Pergerakan dari kontrol eksternal menuju regulasi diri dapat berlangsung maju-mundur dan dipengaruhi usia, lama pendidikan, kultur pesantren, pengalaman organisasi, serta pola komunikasi kiai-santri. Nilai model ini terletak pada kemampuannya menunjukkan arah pedagogis yang dapat diuji: semakin otoritas menghasilkan pemahaman, amanah, ruang keputusan, dan tanggung jawab yang terinternalisasi, semakin dekat relasi tersebut pada *ta'dhim transformatif* dan penguatan *Khudi*.

Untuk kepentingan penelitian lapangan, *ta'dhim transformatif* dapat dikenali melalui beberapa tanda yang cukup konkret: santri tetap mampu mengemukakan pertanyaan secara beradab; kepatuhan disertai pemahaman atas

⁴³Hasanah, Fitriana, and Fitriah, "Dilema Otonomi Akademik Santri," 54–62.

tujuan aturan; amanah bertambah seiring kematangan; tersedia ruang musyawarah pada persoalan yang memerlukan pertimbangan; dan setelah masa pembinaan santri semakin mampu mengambil keputusan serta menanggung konsekuensinya. Tanda-tanda ini sejalan dengan temuan mengenai berpikir kritis yang beretika, negosiasi otoritas, komunikasi partisipatif, dan perubahan pola kepercayaan di pesantren.⁴⁴ Rumusan tersebut membuat konsep ta'dhim transformatif terbuka untuk diuji secara empiris, bukan sekadar dipakai sebagai pembelaan normatif terhadap tradisi.

Model ini tidak berangkat dari anggapan bahwa semua pesantren memiliki struktur yang sama. Pesantren salaf, khalaf, mahasiswa, perempuan, maupun pesantren dengan sekolah formal dapat memiliki distribusi otoritas dan ruang partisipasi yang berbeda. Literatur yang dikaji pun berasal dari lokasi dan isu yang beragam, mulai dari komunikasi, pilihan akademik, praktik syawir, hingga perilaku politik. Karena itu, klaim tentang relasi kiai-santri perlu tetap kontekstual. Ta'dhim transformatif diposisikan sebagai kerangka evaluatif, bukan sebagai deskripsi tunggal realitas pesantren. Kerangka ini membantu menilai apakah suatu praktik penghormatan lebih dekat pada ketergantungan atau pada kedewasaan, serta kondisi apa yang mendorong salah satu hasil tersebut.⁴⁵

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam relasi kiai-santri bukan keberadaan hierarki itu sendiri, melainkan arah pedagogis dari penggunaan otoritas. Otoritas menjadi problematis ketika berubah menjadi dominasi yang menutup ruang berpikir, pilihan akademik, dan tanggung jawab personal. Sebaliknya, literatur memperlihatkan bahwa relasi kiai-santri juga dapat menumbuhkan kepercayaan, keteladanan, kedisiplinan, nalar kritis,

⁴⁴Yasin and Khasbulloh, "Constructing Ethical Critical Thinking," 127–144; Achmadin et al., "Dismantling the Relationship between Kiai and Santri," 153–185; Suroso, Rustandi, and Mujib, "Relasi Otoritas dan Keteladanan," 179–202; Solichin et al., "Reconstruction of Islamic Education Based on Social Capital," 101–110.

⁴⁵Takdir et al., "Understanding Social-Interaction," 125–152; Khumairo', "Do Santri Still Obey the Kiai?," 41–90; Hasanah, Fitriana, and Fitriah, "Dilema Otonomi Akademik Santri," 54–62.

kepemimpinan, dan agensi. Karena itu, menyamakan ta'dhim dengan kepasifan tidak memadai untuk menjelaskan variasi proses pendidikan di pesantren.

Konsep Khudi Muhammad Iqbal memberi ukuran yang lebih berguna untuk membaca persoalan tersebut. Yang penting bukan sekadar seberapa hierarkis hubungan itu tampak, melainkan apa yang terjadi pada personalitas santri. Ta'dhim sejalan dengan Khudi apabila penghormatan kepada otoritas keilmuan mengarah pada disiplin diri, kesadaran, kreativitas, tanggung jawab, keberanian mengambil peran, dan kemampuan membuat keputusan. Jika yang tumbuh justru ketergantungan, tertutupnya dialog, dan hilangnya tanggung jawab individu, ta'dhim telah bergerak menjauh dari arah pendidikan Khudi.

Artikel ini merumuskan arah tersebut sebagai ta'dhim transformatif: otoritas tetap diakui, tetapi keberhasilannya diukur dari kemampuan santri tumbuh sebagai subjek moral dan intelektual. Secara pedagogis, pesantren tidak harus memilih antara adab dan otonomi; adab justru dapat dijadikan dasar bagi tumbuhnya agensi melalui dialog, pemberian amanah secara bertahap, pengalaman memimpin, dan ruang pengambilan keputusan yang sesuai dengan kematangan santri. Dengan demikian, kontribusi konsep ini terletak pada penyediaan kerangka evaluatif bagi praktik pembinaan pesantren. Karena model ini disusun melalui sintesis literatur, penelitian empiris pada berbagai tipe pesantren—salaf, khalaf, pesantren mahasiswa, dan pesantren perempuan—masih diperlukan untuk menguji kondisi yang memperkuat atau menghambat peralihan dari kepatuhan etis menuju penguatan Khudi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadin, Balya Ziaulhaq, Mohammad Asrori, Ahmad Barizi, Abd. Haris, and Abdul Fattah. "Dismantling the Relationship between Kiai and Santri: A Critical Review of the Social and Cultural Dynamics of Pesantren in East Java." *Journal of Research and Thought on Islamic Education* 7, no. 2 (2024): 153–185. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v7i2.3186>.
- Al-Zarnuji, Burhanuddin. *Ta'lim al-Muta'allim Thariq at-Ta'allum*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2004.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Hasanah, Alya, Ani Qotuz Zuhro' Fitriana, and Aidatul Fitriah. "Dilema Otonomi Akademik Santri di Tengah Otoritas Pesantren dan Orang Tua." *Jurnal Wahana Konseling* 8, no. 1 (2025): 54–62. <https://doi.org/10.31851/juang.v8i1.18625>.
- Hasanah, Ulfatul, and Abd. Basid Basid. "Relasi Kiai-Santri dan Tuduhan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren: Kajian Tafsir Tematik Atas Otoritas, Adab, dan Kritik." *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2026): 13–29. <https://doi.org/10.69698/jis.v5i1.1606>.
- Hidayat, Alfian, and Johan Alamsah. "Muhammad Iqbal's Philosophy of Khudi (A Critical Analysis of Modern Science)." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 6, no. 1 (2024): 19–42. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i1.20742>.
- Iqbal, Muhammad. *Asrar-i Khudi (Secrets of the Self)*. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2013.
- Irbathy, Shafa Alistiana, and Naomi Fahma. "Reconstructing Pesantren Pedagogy: Integrating Social-Emotional Learning (SEL) and Sayyidah 'Ā'ishah's Intellectual Rigor to Enhance Student Agency." *Assyfa Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.61650/ajis.v3i1.688>.
- Jannataini, Zahira, Jamali, and Sumanta. "Philosophical Foundation of Islamic Education in Muhammad Iqbal's Asrar-i Khudi: An Ontological, Epistemological, and Axiological Analysis." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 9, no. 1 (2025): 83–99. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v9i1.9434>.
- Khanafi, Ade Firman, Syamsul Arifin, and Fahrudin Mukhlis. "Muhammad Iqbal's Islamic Education Philosophy: Critical Analysis MBKM Curriculum." *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 11, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v11i1.390>.
- Khumairo', Ayu Amanda A'isyatul. "Do Santri Still Obey the Kiai? Examining Voting Behaviour in Traditional and Modern Pesantren during the 2024

- Presidential Election." PCD Journal 13, no. 2 (2025): 41–90. <https://doi.org/10.22146/pcd.v13i2.23363>.
- Lubis, M. Iqbal, Munzir Hitami, and Alpizar. "Pemikiran Muhammad Iqbal: Pengaruh Rekonstruksi Pendidikan Islam pada Dunia Pendidikan Tinjauan Filosofis Antropologis." *at-Tarbiyah al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022): 99–108. <https://doi.org/10.31958/atjpi.v3i2.6031>.
- Malik, Muhammad Umar Ibnu, Tubagus Naufal Ramadhan, and Alwi Akhmad Syibromalisi. "Pesantren Feudalism or Ta'dzim? Contesting Western and Islamic Epistemologies in Digital Discourse." *el-Tarbawi* 19, no. 1 (2026). <https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/45574>.
- Maryam, Siti. "Implementasi Ta'dzim Santri Kepada Kyai dalam Lingkungan Pesantren Perspektif Pedagogi Relasional." *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* 4, no. 1 (2023): 35–48. <https://jnus.lakpesdamsalatiga.or.id/index.php/jnus/article/download/133/66>.
- Masluhah, Kiki Rizkiatul Afifah, and Mohamad Salik. "Pemikiran Muhammad Iqbal tentang Pendidikan Karakter dan Relevansinya dengan Era Disrupsi." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 317–338. <https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.2.317-338>.
- Masruri, Muhammad, Muqowim, and Radjasa. "Konsep Khudi Iqbal dalam Pengembangan Kreatifitas Pembelajaran di Madrasah." *Jurnal Penelitian Keislaman* 16, no. 1 (2020): 46–59. <https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.2220>.
- Muthmainnah and Imam Athoir Rokhman. "Metode Syawir sebagai Strategi Pembelajaran Fiqih untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Santri Pesantren Mahasiswa Al-Hikam." *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 268–277. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/piwulang/article/view/3460>.
- Nauval, Mukhammad Hubbab. "The Authority and Domination of Kyai in Forming Religious Discourse and Practice in Islamic Boarding Schools." *INDEV: Literasi Media Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.31958/indev.v3i1.12471>.
- Nurmahmudah. "Quo Vadis Pendidikan Pondok Pesantren dan Pengaruhnya Otoritas Kiai dalam Perspektif Filsafat Sosiologi." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 2 (2023): 89–110. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/14936>.
- Ramin, Maghfur M. "Rekonstruksi Falsafah Pendidikan Muhammad Iqbal di Era Society 5.0." *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2023): 192–210. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/download/399/219/1565>.

- Rofidah, Lailatur, and Nur Syam. "Fenomenologi Relasi Santri-Kiai di Pesantren: Motif Nata Sandal di Kalangan Santri." *Jurnal TARBAWI* 10, no. 1 (2021): 33-48
- Rohani. "Transformasi Relasi Kyai dan Santri dalam Tradisi Pesantren: Kajian Sosiologi Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 24, no. 2 (2024): 24-42. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/8208>.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (2019): 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Solichin, Mohammad Muchlis, Muhammad Hasan, Ahmad Nadif Muhlisin, and Tsaqif Fiqhan Muhammad. "Reconstruction of Islamic Education Based on Social Capital: A Sociological Analysis of the Transformation of the Relationship between Kyai and Santri in the Digital Era." *IHSAN: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 101-110. <https://doi.org/10.66031/ihsan.v2i1.437>.
- Suroso, Andri, Ridwan Rustandi, and Abdul Mujib. "Relasi Otoritas dan Keteladanan dalam Komunikasi Kiai-Santri." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2026): 179-202. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Tadbir/article/view/21078/0>.
- Takdir, Mohammad, Lusiyanah, Zahratul Jannah, and Min Umniyatil Maimunah. "Understanding Social-Interaction between Nyai and Female Santri in Pesantren Annuqayah, East Java." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 1 (2022): 125-152. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2548>.
- Yasin, Muhamad, and Muhammad Nabil Khasbulloh. "Constructing Ethical Critical Thinking at Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 127-144. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19028>.